

**KAJIAN KRITIS TENTANG INOVASI DAERAH
TERKAIT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA
BERBASIS KOMUNITAS**

Yusuf Adam Hilman

Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Pramuka Gang V, No. 04 Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi
Jawa Timur, Indonesia.

HP. 085755090861 / 082306576716

e-Mail : 545471adamongis@gmail.com

Abstract

Sutan sjahrir once said: "new if our village do start to move forward over his power own, then all our society, will also up individuals at and progress in all the field, including the field culture". Look of the advice, should the community welfare is in vilage's, can be immediately realized, remember village have the potential very large, in various natural resources, resources culture, the characteristics and uniqueness his human, coupled with indorsement village funds almost was 1.5 billion. But ironic if we look at it, why still in rural areas community, still just coming problems hunger, poverty, lost identity and so on, even a lot of which go from village because assume village he live in not were given hope for the future. Problems these problems are real the and trickling in almost all village in indonesian. This, apparently have many provide a to us how to village dioah and managed, because of that village can give hope and welfare for their citizens. The concept of the independence can be realized with a pattern development of backward, with model of development tourist village, here the community called to collectively make a notion how showing potential for many fields including tourism, without damaging and reduce the value of the value local knowledge owned. The outcome of several explained the study a lot of models tourist village, as: tourist village themes culture, tourist village themes potential nature, until tourist village of a religious nature, which some study it reduce on a explaining how village managed in a communal with synchronize with many sides such as; government and private, to shoulder - before build model of development tourist village appropriate to identity the village community. Of all this can be drawn an explanation that it is important comprehend potential in have village, then mengolahna into a activities which is potential to lead on improving the quality of the community, whether materil and moral .Hence we think the development model tourist village relevant to the state of village that were still marginalised.

Password: Innovation Regioni, Tourist Village, Based Regions.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang konsep pembangunan terdapat di negara Indonesia, tidaklah adil jika hanya difokuskan pada daerah tingkat I (satu) ataupun daerah tingkat II (dua) sekelas Provinsi dan Kabupaten / Kota, hal tersebut karena masih ada level pemerintahan yang paling bawah, dan merupakan sistem pemerintahan tertua di negeri ini yakni pemerintahan desa. Dalam perjalanan panjang sejarah di Indonesia, keberadaan desa memiliki identitas penamaan yang beragam, selain itu model pemerintahan desa juga memiliki sifat yang khas, serta sistem pemerintahan yang berbeda, sesuai dengan kultur yang terdapat didaerahnya tersebut.

Namun jauh sebelum temuan tersebut diyakini terdapat desa atau dengan beragam nama lain seperti Dusun, Marga, Kampung, Gampong, Dati, Nagari dan Wanua yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa. (Ndara. 2010: 154)

Desa-desa yang telah ada jauh sebelum itu memiliki konstruksi organisasi paling minimalis dimana kepala desa merupakan simbol dalam semua entitas pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan politik. Integrasi semua fungsi dalam personifikasi kepala desa merupakan konstruksi sistem politik totaliter klasik yang cenderung memberi diskresi bagi kepala desa dalam memainkan peran dominan bagi kehidupan kelompok. Secara kelembagaan kepala desa menjadi representasi politik sebab ia secara tradisional dilahirkan untuk memimpin kelompok masyarakat dalam sebutan yang tertua (*tetua*). (Nurcholis. 2013: edisi 38)

Karakteristik sistem pemerintahan lahir dan terbentuk dari akar budaya yang ada di masyarakat, secara bertahap – tahun melewati perodesasi masa, sehingga menghasilkan model desa seperti yang kita lihat saat ini. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, desa (yang memiliki penduduk dan tanah) selalu menjadi obyek birokratisasi dan pembangunan oleh negara serta eksploitasi oleh pemilik modal. Negara membuat banyak peraturan (yang sering mengalami bongkar pasang dan selalu mengambang) bukan untuk menghormati dan mengangkat harkat dan martabat orang desa, tetapi digunakan untuk mengendalikan desa guna mendukung kepentingan sepihak pemerintah, baik konsolidasi politik maupun pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama pemerintah melancarkan berbagai proyek pembangunan ke desa sebagai bentuk, “politik elit” dan proyek jangka pendek untuk kepentingan jajaran birokrasi negara. Setiap proyek pembangunan yang masuk ke desa tidak semata – merta memberdayakan rakyat desa, tetapi justru memperkaya para pelaksana dari unsur birokrasi maupun kepala desa. Karena hal itu, selama era reformasi, muncul agenda pembaharuan desa secara berkelanjutan. Tujuan pembaharuan desa adalah mendorong desa lebih otonom, demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Selain dengan kebijakan dan pembangunan yang pro desa, desentralisasi dan otonomi desa merupakan agenda penting dalam pembaharuan desa. Desentralisasi dan otonomi desa membutuhkan berbagai prakarsa lokal, gerakan bersama, komitmen politik dan

kebijakan pemerintah. (Sutoro Eko. 2008: 76 – 77)

Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, entitas pemerintahan terendah semacam desa diakui merupakan basis tumbuhnya pemerintahan yang lebih luas dan kompleks sebagaimana pemerintahan modern dewasa ini. (Mc Iver. 199: 33 – 35)

Perjalanan sejarah bangsa telah membuktikan bahwa desa telah melalui banyak ujian serta lika – liku, khususnya yang terkait dengan bentuk ideal dan praktik pemerintahan serta penyelenggaraan negara dalam upaya mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Maka pada saat ini, Desa diberikan kesempatan dan juga kewenangan untuk mengurus daerahnya, dengan alokasi dana yang cukup besar.

Terkait dengan itu, undang-undang desa menentukan bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD dan sumber lain yang sah. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari Pajak / Retribusi / DAU / DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia. (Handout Materi Sosialisasi RUU Desa. 2013)

Dengan potensi keuangan dan juga payung hukum yang jelas, maka desa bisa secara mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sesuai amanat yang terkandung dalam undang – undang desa. Supaya

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata. Selain itu pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan desa, untuk menjalankan tugas – tugasnya dengan asas desentralisasi, yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tidaklah mudah mengingat jumlah desa di Indonesia saat banyak, dan tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes), Marwan Jafar, mengatakan, Di Indonesia, terdapat 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Sebagian desa tersebut berada di 122 kabupaten yang masih memiliki predikat kawasan daerah tertinggal. (<http://www.beritasatu.com/nasional/336997-indonesiavietnam-punya-persoalan-desa-yang-sama.html> pada 22 Februari 2017)

Selain itu tingkat keragaman desa di Indonesia sangat tinggi, sehingga perlu pendekatan khusus terkait kebudayaan dan corak masyarakatnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu penting, memahami desa tidak hanya terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sebuah desa.

Dalam kegiatan pembangunan yang ada di pedesaan, biasanya ada beberapa model, yaitu: 1). Pembangunan fisik, tujuannya memberikan kemudahan terhadap akses – akses publik yang dibutuhkan desa, seperti: jalan, lapangan, rumah sakit, tempat ibadah dan lain sebagainya. Sehingga

diharapkan masyarakat menjadi mudah dan merasa kebutuhan – kebutuhan publiknya, di perhatikan oleh pemerintah, sehingga kegiatan keseharian dapat diselenggarakan dengan baik, misalnya: aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. 2). Pembangunan sumber daya manusia, disini lebih ditekankan tentang bagaimana kualitas masyarakat yang ada di desa bisa dikembangkan, dengan berbagai macam pelatihan yang aplikatif, ditujukan supaya kualitas manusianya menjadi lebih baik. Implikasinya, dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup secara mandiri dan mempunyai motivasi untuk berjuang dengan segala keterbatasan yang ada, dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari – harinya. 3). Perpaduan pembangunan fisik dan juga pembangunan sumber daya manusia, yang berbasis kekuatan sosial pada komunitas tersebut, maksudnya adalah melakukan berbagai kegiatan yang menekankan pada bagaimana masyarakat secara komunal bisa bahu membahu, menjalankan kegiatan yang bisa berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok, mereka dengan cara swadaya dan mandiri yang berbasis komunitas. Pada kesempatan ini, kami mencoba menawarkan model yang ketiga, dengan membuat gagasan terkait konsep kemandirian desa, melalui penancangan desa wisata yang ideal.

Kita ketahui bahwa potensi pariwisata di Indonesia sangatlah banyak, dan mayoritas posisi obyek tersebut merupakan bagian administratif dari pemerintahan desa, oleh karena itu model pembangunan kepariwisataan di desa, ternyata sangat menarik dan bisa menjadi

solusi terhadap permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya, yang seringkali dialami masyarakat pedesaan.

Selama ini banyak sekali model kegiatan terkait pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintahan, dan private sector, akan tetapi tingkat efektifitas dan efesiesnya, masih belum bisa maksimal, oleh karena itu kami akan mencoba menggagas, bagaimanakah konsep desa wisata yang ideal dapat dikelola dan dikembangkan secara komunal, dengan konsep dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Kajian ini menggunakan pendekatan kritis, dengan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan. Maksudnya ialah memberikan telaah atau analisis kritis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menghasilkan analisis deskriptif.

Berbagai Model Pengembangan Desa Wisata

1. Model Desa Wisata Budaya

Secara garis besar konsep model kampung wisata budaya terpadu (Mokatabu) merupakan representasi, objek wisata budaya yang mengintegrasikan kekhasan etnik budaya suku tertentu dalam satu kesatuan (lokasi) untuk menjaga identitas nasional yang berakar pada penguatan identitas lokal. Kampung wisata budaya ini menampilkan nuansa kelokalan baik secara esensi, artifisial, maupun lingkungan alam, dengan melibatkan totalitas kekayaan budaya, adat istiadat dan pola kehidupan. (Safi Harto. Diakses dari <http://repository.unri.ac.id/> pada 20 Februari 2016) .

2. Desa Wisata Alam (Agraris dan Bahari)

Pulau Sempu merupakan wilayah wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin menikmati konsep ekowisata. Pengembangan ekowisata di wilayah pulau sempu hendaknya dapat diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta tidak berbenturan dengan upaya konservasi yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah ini. (Dias Satria. 2009: *Vol.3 No.1 Mei 29, hal37 – 47*).

Kegiatan sehari - hari masyarakat yaitu bertani menjadi ciri khas desa Bandungan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang berbasis agrowisata yang memiliki atraksi wisata lain yaitu mempelajari cara memelihara sapi khusus karapan sapi dan sapi sono' dan juga mempelajari cara membuat menggunakan alat tradisional yang kemudian pengembangannya secara spesial terbagi menjadi tiga, yaitu menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata yang memperlihatkan kegiatan sehari – hari masyarakat desa Bandungan, menyediakan sarana transportasi khusus untuk menuju kawasan desa wisata untuk mempermudah wisatawan berkunjung kawasan desa wisata dan menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan wisata. (Faris Zakaria. 2014: *Vol.3 No.02*)

Kawah Ijen memiliki potensi besar bagi pengembangan ekowisata, meskipun belum sepenuhnya dikembangkan, sumber yang paling utama adalah panorama / pemandangan kawah gunung ijen dengan tiga warna berbeda, yaitu:

hijau, biru, dan kuning emas. Selain itu, aktivitas manusia mengambil belerang dari kawah, potensi lain yang mendukung yaitu flora dan fauna yang beragam di wilayah tersebut. Daya tarik lain yang mendukung ekowisata yaitu potensi budaya yang unik dari komunitas yang berdekatan dengan gunung Ijen. Untuk meningkatkan implementasi konsep ekowisata atau kriteria, diperlukan pelatihan.

Selain itu masyarakat setempat harus dilibatkan dalam program. Desa harus mendirikan fasilitas persinggahan untuk mengakomodasi pengunjung yang melewati desa Taman Sari menuju Kawah Ijen. (Sri Widowati. 2012)

3. Desa Wisata Sejarah & Religius

Pengelolaan makam Sultan Hadiwijaya sudah berjalan dengan baik yaitu meliputi pengelolaan wisata religi, pengelolaan sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya finansial. Faktor - faktor pendukung maupun penghambat untuk pengelolaan wisata religi di kompleks makam Sultan Hadiwijaya hendaknya selalu ditingkatkan, misal pemberian informasi kepada pihak luar, menjalin kerjasama dengan pemerintah yang paling utama Dinas Pariwisata, bekerjasama dengan Kraton Surakarta maupun dengan masyarakat. (Ashana Mustika Ati, 2011)

Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur

tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, Akomodasi dan fasilitas pendukung. (Darsono. 2005: Vol.3 No.02)

1. Karakteristik Desa Wisata Budaya

Model desa wisata ini biasanya lebih menekankan pada identitas budaya yang coba ditampilkan, secara natural, dan apa adanya, sehingga nampak jelas bagaimana masyarakat hidup, bersosialisasi dan membangun komunikasi dengan komunitasnya. Selain itu model desa wisata budaya juga dituntut untuk dapat menyentuh komponen – komponen kawasan secara mendasar, yaitu: a). Pemberdayaan masyarakat pelaku wisata budaya. b). Pengembangan pusat – pusat kegiatan wisata sebagai titik pertumbuhan. c). Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang. d). Adanya keterpaduan antar kawasan yang mendukung upaya peningkatan dan pelestarian daya dukung lingkungan serta sosial dan budaya setempat. e). Adanya keterpaduan kawasan wisata budaya dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan nasional. (Safi Harto. Diakses dari <http://repository.unri.ac.id/> pada 20 Februari 2016).

2. Karakteristik Desa Wisata Alam (Agraris dan Bahari)

Karakteristik desa wisata alam, yaitu biasanya memiliki karakteristik untuk melakukan eksplorasi terhadap keindahan alam, selain itu desa wisata ini berusaha mengajak wisatawan untuk kembali ke alam,

dan belajar dari alam, tentang cara hidup berdampingan yang selaras dengan alam, sehingga manusia dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya alam.

3. Karakteristik Desa Wisata Sejarah & Religius

Karakteristik desa wisata religius biasa dikaitkan dengan beberapa tempat – tempat suci dan juga bersejarah, yang diyakini sebagai tempat yang dianggap memiliki kekuatan, atau tempat bersejarah bagi agama atau kepercayaan tertentu.

Bentuk Aplikatif Desa Wisata

Dari beberapa penjelasan tersebut kita dapat memberikan gambaran, bentuk konkrit dari konsep desa wisata, seperti yang diilustrasikan oleh beberapa gambar, berikut:



Gambar 1. Salah satu contoh model desa wisata budaya.

Sumber ; diakses dari www.google.com



Gambar 2. Salah satu contoh model desa wisata Agraris.

Sumber ; diakses dari www.google.com



Gambar 3. Salah satu contoh model desa wisata bahari

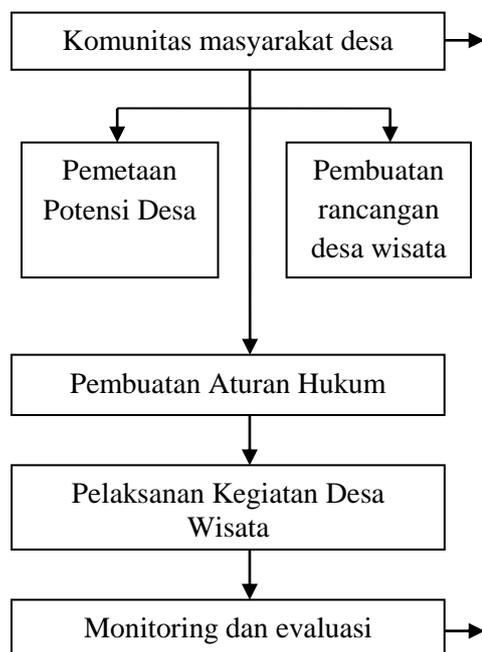
Sumber ; diakses dari www.google.com



Gambar 4. Salah Satu contoh Desa Religius.

Sumber ; diakses dari www.google.com

Skema Pembentukan Desa Wisata



Gambar 5. Pembentukan Desa Wisata

Dari uraian tersebut, dapat kami berikan penjelasan terkait proses pembentukan desa wisata, dimana dalam langkah – langkahnya kami

uraikan, sebagai berikut: 1). Pembentukan komunitas masyarakat atau meneruskan kelompok sosial yang ada, 2). Kemudian komunitas tersebut memerakan potensi yang ada berupa, potensi budaya, ekonomi, sumber daya alam, dan lain sebagainya, 3). Setelah itu dibuatlah desain dan mekanisme pengelolaan desa wisata, 4). Kemudian membuat peraturan desa atau produk hukum, yang mengatur soal pengelolaan, retribusi, dan juga lainsebagainya, 5). Melakukan pelaksanaan kegiatan desa wisata, dengan melakukan publikasi dokumentasi, 6). Melanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan desa wisata, selain itu dalam pelaksanaan desa wisata, harus ditekankan peran serta komunitas, khususnya warga masyarakat untuk mengelola desa wisata dengan konsep dari desa, oleh desa dan untuk desa.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat digambarkan bahwa konsep desa wisata bisa diterapkan di Indonesia, khususnya didaerah – daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunannya, mengingat secara geografis dan ekonomi, wilayah Indonesia hampir sama. Yang diperlukan saat ini adalah inisiatif dan kemauan dari masyarakat dalam upaya berperan aktif untuk mendukung konsep desa wisata, dan mengimplementasikan dalam lingkungannya, hal ini sangat penting mengingat beberapa desa telah berhasil melaksanakan program tersebut, dan manfaatnya bisa dirasakan saat ini, terlebih lagi, secara perlahan – lahan komunitas masyarakat yang ada di desa tersebut merasakan efek kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Iver, Mc. 1999. *Jaring-Jaring Pemerintahan (The Web of Government)*, Laila Hasyim, Jakarta: Aksara Baru. Jilid 1.

Ndraha. 2010. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutoro Eko. 2008. *Masa lalu, masa kini dan masa depan otonomi desa*. Working Paper/Eko/ II/ February/2008 IRE'S INSIGHT. Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment (IRE).

Skripsi, Tesis, & Disertasi

Ashana Mustika Ati, 2011. *Pengelolaan Wisata Religi (Studi Kasus Makam Sultan Hadiwijaya Untuk Pengembangan Dakwah)*. Skripsi. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo. Semarang.

Safi Harto. *Kajian Budaya Wisata Terpadudalam rangka mengoptimalkan Potensi Lokaldalam meningkatkan daya saing bangsa (optimalisasi wisataKawasan Muara Takus, Kabupaten Kampar Propinsi Riau)*. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Riau. Diakses dari <http://repository.unri.ac.id/> pada 20 Februari 2016.

Sri Widowati. 2012. *Kajian Potensi dan Evaluasi Penerapan*

Prinsip – Prinsip dan kriteria ekowisata dikawasan wisata alam kawah Ijen, Desa Taman Sari Kabupaten Banyuwangi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.

Modul

Hand out tentang Materi Sosialisasi RUU Desa Tahun 2013.

Jurnal

Dias Satria. 2009. *Strategi Pengembangan Ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilauah Kabupaten Malang*. Jurnal Of Indonesia Aplied Economics. Vol.3 No.1 mei 29, hal37 – 47. Fakultas Ekonomi. Niversitas Brawijaya . Malang.

Faris Zakaria dan Rima Dwi Supriharjo, 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan desa wisata di desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik Pomits Vol.3 No.02. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Sepuluh November. Surabaya.

Nurcholis, Hanif, 2013. *Dua Ratus Tahun Praktek Demokrasi Desa, Potret Kegagalan Adopsi Demokrasi Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta.

Internet

Diakses dari
<http://www.beritasatu.com/nasional/336997-indonesiavietnam-punya-persoalan-desa-yang-sama.html> pada 22
Februari 2017.

Gambar visual desa wisata diakses
dari <http://www.google.com>
pada 24 Maret 2016.